

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga-lembaga informal lainnya yang ada di masyarakat.

Perspektif kontemporer tentang Negara demokratis menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional (National Democracy) dikarenakan banyaknya kesempatan bagi berkembangnya partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah yang ditopang hadirnya iklim demokrasi yang menghargai kebebasan dan perbedaan pendapat.

Perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah. Dengan demikian, terbuka peluang yang sangat besar bagi penguatan kapasitas politik masyarakat melalui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan institusi lainnya yang ada didalam

masyarakat serta kemandirian daerah dalam memilih pemimpin di daerah melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Namun demikian kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat ditegakkan didalam masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh norma-norma politik demokratis pula. Hal yang mendasar adalah ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan mekanisme politik, budaya demokrasi seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik ditingkat lokal saat ini.

Untuk itu sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- 1) Terfasilitasinya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menghimpun bahan/data/informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedewanan.
- 2) Terfasilitasinya hubungan yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan stakeholder dan penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokratis, serta terpublikasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Terfasilitasinya pembangunan budaya politik yang dan berlandaskan pada moralitas dan etika politik yang menghormati dan menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran serta keadilan

- 4) Terfasilitasinya lingkungan dinamika suasana politik yang kondusif sesuai dengan prinsip demokratis.

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2002, Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pelayanan administrasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Penyusunan Perencanaan strategis, evaluasi dan pelaporan;

4. Mengumpulkan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta penyimpanan rancangan produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Penyiapan penyelenggaraan dan pembuatan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pengamanan dan penertiban dilingkungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
9. Peliputan Kegiatan Anggota Dewan dalam Kunjungan Lapangan & Kunjungan Kerja;
10. Penerbitkan Majalah Mimbar Legislatif setiap bulan;
11. Mengadakan Seminar per tiga bulan untuk mendukung pencapaian Kesejahteraan Masyarakat.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa

Tengah terdiri dari :

- 1. Sekretaris Dewan;**
- 2. Bagian Umum, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.

3. Bagian Persidangan Risalah dan Perundang-undangan, membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- b. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan;
- c. Sub Bagian Perundang-undangan;

4. Bagian Keuangan, membawahi :

- a. Sub Bagian Akuntansi;
- b. Sub Bagian Perencanaan & Anggaran;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan.

5. Bagian Humas dan Pengkajian, membawahi :

- a. Sub Bagian Humas dan Publikasi;
- b. Sub Bagian Protokol dan Aspirasi.
- c. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat seorang tenaga paramedis yang melayani Poliklinik Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
3. Pejabat fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan serta ketertiban ke dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dasar hukum penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5).
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11)

B. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan ketentuan masyarakat akan profesionalisme kinerja lembaga dan Aparatur Pemerintah Daerah semakin besar dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan serta pembangunan yang partisipatif.

Permasalahan yang dihadapi bidang aparatur pemerintah daerah, adalah :

- a. Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan fungsi pelayanan publik.
- c. Masih belum efektif sistem manajemen.
- d. Masih lemahnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien.
- e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya Good Governance.
2. Peningkatan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan aparatur pemerintah daerah, adalah

1. Melaksanakan pengkajian.
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM.
3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem.
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sistem.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Strategi yang dilakukakan untuk mencapai tujuan pembangunan adalah :

1. Mengkaji dan mengevaluasi;
2. Melakukan peningkatan kualitas;
3. Mengoptimalkan efektifitas;
4. Mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi sistem pengawasan.

Program yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah Daerah adalah :

1. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
2. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah;
3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan.

C. Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja yang diawali dengan uraian singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat pula tentang landasan hukum penyusunan Rencana Kerja terkait pula dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bab II : Visi, Misi dan Nilai-nilai Organisasi

Dalam Bab ini memuat rumusan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta pernyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut.

Selanjutnya dikemukakan pula nilai-nilai yang melandasi pernyataan misi dalam mencapai visi tersebut, yang sekaligus sebagai pedoman moral dan etika bagi setiap personil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pengabdianannya, visi, misi, dan nilai-nilai akan menunjukkan identitas dari organisasi tersebut.

Bab III : Kondisi Lingkungan Strategik.

Dalam Bab ini secara substansi memuat identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan Kendala terhadap organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Faktor-faktor lingkungan strategis ini digali melalui identifikasi pelanggan dan Stakeholders beserta ekspektasinya serta Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal organisasi. Selanjutnya melalui pembobotan dan rating ditemukan Kesimpulan Analisis Faktor Lingkungan Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Lingkungan Eksternal (KA FE).

Bab IV : Isu-Isu Strategis berdasarkan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada Bab ini dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian/sub bagian dalam SKPD sehingga menjadi kendala, peluang dan prioritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bab V : Rencana Kerja dan Perencanaan Kinerja

Bab ini memuat Program Kegiatan dan Target Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bab VI : Penutup

Memuat tentang penegasan fungsi Rencana Kerja (Renja), yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta sebagai referensi bagi semua pelanggan dan stakeholders.

- Daftar Pustaka :**
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5).
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran : Berisi tentang teknis operasional dalam penyusunan identifikasi faktor-faktor internal, eksternal dan pelanggan internal, eksternal serta stakeholders. Asumsi strategis, analisis lingkungan strategis, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, faktor kunci keberhasilan, Rencana kerja, tujuan, sasaran, strategi (kebijakan, program dan kegiatan) serta perencanaan kinerja dan indikatornya.

BAB. II

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategik organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapai organisasi baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan Visi, Misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang datang.

Visi adalah pernyataan tentang masa depan yang ditulis atau dibicarakan sekarang hal ini adalah suatu proses bagaimana mengelola keadaan dini (masa sekarang) dengan merentangkan pandangan ke masa depan (A Vision is a statement about the future, spoken or written today; is it a process of managing the present from a stretching view of the future).

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang, pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu penjelasan tentang bisnis, produk atau pelayanan yang ditawarkan dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pencapaian tujuan.

Upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi diperlukan nilai-nilai yang diyakini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Nilai-nilai adalah kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu.

A. Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

"Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkemampuan mendukung kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Aspiratif, Transparan, dan Akuntabel"

B. Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. Meningkatkan Kinerja dan SDM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Memfasilitasi secara administrasi dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewan dengan Stakeholder
2. Mendukung fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan dengan Eksekutif
3. Memfasilitasi administrasi keuangan secara Transparan dan Akuntabel dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Nilai-nilai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. Sopan dalam bersikap;
2. Sabar dalam menghadapi permasalahan;
3. Sederhana dalam penampilan;
4. Menyenangkan dalam pelayanan;
5. Manusiawi dalam bertindak.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil melaksanakan Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada RJPM Daerah (Renstrada) maka diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan baik indikator makro maupun indikator mikro. Indikator kinerja makro merupakan ukuran keberhasilan yang tidak hanya ditentukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah semata tetapi juga oleh berbagai sektor lain yang menunjang, sedangkan indikator kinerja mikro merupakan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan organisasi untuk mengukur kinerjanya sendiri.

Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut **"Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkemampuan mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Aspiratif, Transparan dan Akuntabel"**.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah : 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 kegiatan	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari 10 kegiatan	100 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari 1 kegiatan	100 %
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , yang terdiri dari 1 kegiatan	100 %
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari 9 kegiatan	100 %

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 5 program, selanjutnya dilaksanakan melalui 35 kegiatan yang dibiayai dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat *outcome*.

Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong agar "***tertib dalam pemerintahan***" dapat dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di daerah (*good local governance*) menuju terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented governance*).

Saat ini yang dibutuhkan adalah adanya kemauan untuk menuju ke sana yang didukung pada Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah:

1. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Meningkatkan Kinerja dan sumber daya manusia Sekretariat Dewan
3. Mendukung fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif.

BAB III

KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIK

A. IDENTIFIKASI FAKTOR LINGKUNGAN STRATEGIK

Dalam rangka mempertahankan eksistensi organisasi perlu mengenali dan menguasai berbagai informasi dilingkungan strategik yang meliputi :

1. Identifikasi Pelanggan Sekretariat DPRD : Anggota DPRD, Stakeholders dan Anggota masyarakat.

Pelanggan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal, sedangkan pelanggan internal terdiri dari : para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, para Komisi-Komisi dan Fraksi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun pelanggan eksternal terdiri dari : Wartawan, LSM dan Ormas Masyarakat.

Stakeholders Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi Badan, Dinas, Kantor, Bakorwil, Perguruan Tinggi dan Kabupaten/Kota.

Ekspektasi (harapan) pelanggan internal yang dapat indentifikasi sebagai berikut :

- a. Sinergi dalam pelayanan publik
- b. Sinergi dalam pelayanan administrasi
- c. Koordinatif dalam pelaksanaan tugas.
- d. Terciptanya iklim yang kondusif
- e. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Adapun ekspektasi dari pelanggan eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kecepatan dalam pelayanan
- b. Akurat dalam pelayanan.
- c. Efisien dan efektif dalam pelayanan
- d. Tertib Administrasi Pelaksanaan Tugas.

Ekspektasi dari stakeholders dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Transparan dalam pelayanan
- b. Akuntabel dalam pelayanan.
- c. Responsif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
- d. Efisiensi dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel. 3.1.
Identifikasi Pelanggan :
Anggota DPRD, Stakeholders dan Anggota masyarakat

<p>PELANGGAN INTERNAL Pegawai Sekretariat DPRD Prov. Jateng</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Kesejahteraan • Suasana kerja yang kondusif • Pengembangan karier secara proporsional dan transparan • Peningkatan etos kerja 	<p>Pengembangan karier secara proporsional, transparan dan kesejahteraan</p>
<p>PELANGGAN EKSTERNAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan 2. Organisasi Masyarakat 3. LSM 4. Partai Politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya tugas secara baik dan lancar • Terpenuhinya kesejahteraan • Kelancaran Administrasi Keuangan • Terjaminnya keamanan 	<p>Terlaksananya tugas secara baik, lancar, cepat dan tepat waktu</p>
<p>STAKEHOLDERS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi 2. Pengusaha 3. Instansi 4. Organisasi Kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersaluranya aspirasi yang diakomodasi oleh Sekretariat Dewan dalam hal ini bagian Humas • Anggota DPRD bisa melaksanakan tugasnya secara profesional • Terciptanya koordinasi yang baik antara stakeholder dan Anggota Dewan 	<p>Tersaluranya aspirasi masyarakat yang diakomodasi oleh Sekretariat Dewan (Humas)</p>

2. Identifikasi Faktor-faktor Lingkungan Strategik

Identifikasi faktor-faktor strategik dilakukan dengan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, pencermatan lingkungan internal akan menemukan faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

a. Kekuatan

- a. Jumlah SDM dan tingkat pendidikan sudah memadai dengan komposisi pendidikan tingkat sarjana 40 % (aparatur yang memadai)
- b. Asset sarana dan prasarana yang memadai
- c. Anggaran yang memadai
- d. Peran serta dukungan masyarakat

b. Kelemahan

- 1) Kompetensi aparatur yang belum memadai;
- 2) Penegakan aturan disiplin yang lemah;
- 3) Budaya kerja aparatur yang berorientasi pada jabatan bukan prestasi;
- 4) Kurangnya tingkat konsistensi dan komitmen para pimpinan.

c. Peluang

- 1) Obsesi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terpenuhi dalam pelayanan terhadap Anggota DPRD.
- 2) Kebijakan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Bidang pembagian kerja dan pelayanan kepada publik
- 3) Terbukanya kran komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan.

3. Kendala

- a. Kompetisi Sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tidak sehat.
- b. Perkembangan tehnologi di bidang media elektronik.
- c. Adanya pemberitaan pada media massa yang kurang menyenangkan.

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor-faktor Lingkungan Strategik

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS)	PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Jumlah SDM aparatur yang memadai. 2. Asset sarana dan prasarana yang memadai 3. Anggaran yang memadai 4. Peran serta dukungan masyarakat	1. Obsesi Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terpenuhi dalam pelayanan terhadap Anggota DPRD. 2. Kebijakan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Bidang pembagian kerja dan pelayanan kepada publik 3. Terbukanya kran komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan
KELEMAHAN (WEAKNESSES)	KENDALA (THREATS)
1. Kompetensi aparatur yang belum memadai 2. Penegakan aturan disiplin yang lemah 3. Budaya kerja aparatur yang berorientasi pada jabatan bukan prestasi 4. Kurangnya tingkat konsistensi dan komitmen para pimpinan	1. Kompetisi sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tidak sehat 2. Perkembangan teknologi di bidang media elektronik. 3. Adanya pemberitaan pada media massa yang kurang menyenangkan.

B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

- **Pencermatan Lingkungan Internal**

Kondisi lingkungan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kekuatan :

- 1) Jumlah SDM dan tingkat pendidikan sudah memadai dengan komposisi pendidikan tingkat sarjana 40 % (S1 dan S2)
- 2) Sumber dana mencukupi
- 3) Sarana dana prasarana memadai
- 4) Ketersediaan sumber daya teknologi memadai

Kelemahan :

- 1) Masa kerja yang lama dan jarang diadakan mutasi dan rolling
- 2) Rutinitas pekerjaan menimbulkan kejenuhan.
- 3) Tuntutan kontra prestasi ekstra terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PNS di lingkungan kantor tersebut.

• **Pencermatan Lingkungan Eksternal**

Peluang :

- Terpenuhinya dukungan dan pelayanan secara memadai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Penataan pegawai disesuaikan dengan kapasitas dan sesuai dengan Job Description (kompetensi)

Ancaman :

- Tingkat inflasi yang sudah menentu sehingga tuntutan biaya hidup semakin tinggi.
- Kapasitas pegawai tidak sesuai/seimbang dengan jumlah/volume kerja.
- Banyak tuntutan dari berbagai elemen masyarakat (Perguruan Tinggi, LSM, Parpol/Ormas dan lain-lain) untuk bisa dipenuhi kebutuhannya.

C. Kesimpulan Analisis Faktor Internal Dan Eksternal

1. Kesimpulan Analisis Faktor Internal

Kekuatan :

- a. Jumlah SDM aparatur yang memadai diberi bobot 30 yang merupakan rating pertama dari kekuatan dan mempunyai skor 60 dan menjadi prioritas pertama
- b. Sarana dan prasarana yang memadai diberi bobot 15 yang merupakan rating ketiga dari kekuatan sehingga mempunyai skor 45 dan menjadi prioritas kedua
- c. Sumber dana yang mencukupi diberi bobot 20 yang merupakan rating kedua dari kekuatan dan mempunyai skor 40 dan menjadi prioritas ketiga
- d. Ketersediaan sumber daya teknologi yang memadai diberi bobot 5 yang merupakan rating keempat dari kekuatan sehingga mempunyai skor 20 dan menjadi prioritas keempat

Kelemahan :

- a. Tuntutan kontra prestasi ekstra terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PNS di lingkungan kantor tersebut diberi bobot 10 yang merupakan rating kedua dari kelemahan dan mempunyai skor 20 dan menjadi prioritas pertama
- b. Masa kerja yang lama dan jarang diadakan mutasi dan rolling diberi bobot 5 yang merupakan rating ketiga dari kelemahan sehingga mempunyai skor 45 dan menjadi prioritas kedua

- c. Rutinitas pekerjaan menimbulkan kejenuhan diberi bobot 10 yang merupakan rating pertama dari kelemahann dan mempunyai skor 10 dan menjadi prioritas ketiga

Tabel. 3.3
Kesimpulan Analisis Faktor Internal

No	Faktor-faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor (3x4)	Kesimpulan (Prioritas)
1	2	3	4	5	6
	KEKUATAN				
	1. Jumlah SDM dan tingkat pendidikan sudah memadai dengan komposisi pendidikan tingkat sarjana 40 % (S1 dan S2)	30	1	60	I
	2. Sumber dana mencukupi	20	2	40	III
	3. Sarana dan prasarana memadai	15	3	45	II
	4. Ketersediaan sumber daya teknologi memadai	5	4	20	IV
	KELEMAHAN				
	1. Masa kerja yang lama dan jarang diadakan mutasi dan rolling	5	3	15	II
	2. Rutinitas pekerjaan menimbulkan kejenuhan.	10	1	10	III
	3. Tuntutan kontra prestasi ekstra terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PNS di lingkungan kantor tersebut	10	2	20	I
	Total	100			

2. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal

Peluang :

- a. Terpenuhinya dukungan dan pelayanan secara memadai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberi bobot 25 yang merupakan rating kedua dari peluang dan mempunyai skor 50 dan menjadi prioritas pertama
- b. Penataan pegawai disesuaikan dengan kapasitas dan sesuai dengan Job Description (kompetensi) diberi bobot 20 yang merupakan rating pertama dari peluang sehingga mempunyai skor 20 dan menjadi prioritas kedua.

Kendala :

- a. Tingkat inflasi yang sudah menentu sehingga tuntutan biaya hidup semakin tinggi diberi bobot 25 yang merupakan rating kedua dari ancaman dan mempunyai skor 50 dan menjadi prioritas pertama
- b. Banyak tuntutan dari berbagai elemen masyarakat (Perguruan Tinggi, LSM, Parpol/Ormas dan lain-lain) untuk bisa dipenuhi kebutuhannya diberi bobot 10 yang merupakan rating ketiga dari ancaman sehingga mempunyai skor 30 dan menjadi prioritas kedua
- c. Kapasitas pegawai tidak sesuai/seimbang dengan jumlah/volume kerja diberi bobot 20 yang merupakan rating pertama dari ancaman dan mempunyai skor 20 dan menjadi prioritas ketiga.

**Tabel 3.4
Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal**

No	Faktor-faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Skor (3x4)	Kesimpulan (Prioritas)
1	2	3	4	5	6
	PELUANG				
	1. Terpenuhinya dukungan dan pelayanan secara memadai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25	2	50	I
	2. Penataan pegawai disesuaikan dengan kapasitas dan sesuai dengan Job Description (kompetensi)	20	1	20	II
	ANCAMAN				
	1. Tingkat inflasi yang sudah menentu sehingga tuntutan biaya hidup semakin tinggi.	25	2	50	I
	2. Kapasitas pegawai tidak sesuai/seimbang dengan jumlah/volume kerja.	20	1	20	III
	3. Banyak tuntutan dari berbagai elemen masyarakat (Perguruan Tinggi, LSM, Parpol/Ormas dan lain-lain) untuk bisa dipenuhi kebutuhannya.	10	3	30	II
	Total	100			

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

A. KENDALA

- 1) Belum optimalnya peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang disebabkan belum berjalannya peran dan fungsi DPRD, partai politik dan ormas dalam melaksanakan peran dan fungsi politik.
- 2) Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini antara lain disebabkan oleh dinamika perubahan dalam masyarakat dan kebijakan otonomi daerah yang belum mantap, kesadaran dan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) relatif masih rendah
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum dalam pelayanan publik yang antara lain disebabkan sarana dan prasarana, dan kapasitas aparat dalam pelaksanaan pemerintahan yang amanah belum sepenuhnya dilaksanakan
- 4) Belum optimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman Kabupaten/Kota terhadap seperangkat peraturan tentang otonomi daerah
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan akses teknologi informasi, antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ekonomi dan ketimpangan sarana dan prasarana terutama di pedesaan

- 6) Belum optimalnya kerjasama daerah antara lain disebabkan kemampuan aparaturnya yang di daerah belum profesional, peraturan daerah tersebut belum sinkron dalam mendukung kerjasama daerah
- 7) Belum sinerginya dan sinkronnya regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dan kadang-kadang berubah-ubah yang mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengimplementasikan dan optimalisasikan tertib administrasi keuangan daerah
- 8) Belum optimalnya peningkatan pengelolaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini antara lain disebabkan belum mantapnya peraturan perundangan tentang kerjasama daerah, belum optimalnya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah serta keterbatasan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 9) Belum optimalnya inventarisasi asset daerah yang disebabkan oleh penggunaan dan pemanfaatan asset daerah serta masih lemahnya manajemen asset
- 10) Belum optimalnya tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang disebabkan oleh terbatasnya aparaturnya pemeriksa dan aparaturnya pengawas, dukungan peraturan perundangan serta kesadaran hukum masyarakat

B. PELUANG

- 1) Meningkatkan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah

- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik, dan peningkatan kapasitas aparatur
- 5) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui peningkatan mutu pendidikan perbaikan taraf hidup ekonomi serta mengurangi ketimpangan sarana dan prasarana teknologi informasi antara pedesaan dan perkotaan
- 6) Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui sinkronisasi peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah
- 7) Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib
- 8) Meningkatkan inventarisasi aset daerah melalui penguatan manajemen aset dan pemanfaatan aset daerah
- 9) Mengoptimalkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah
- 10) Mengoptimalkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui dukungan peraturan perundangan-undangan serta kesadaran hukum masyarakat

C. PROGRAM PRIORITAS MENANGANI KENDALA

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kuantitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- 2) Mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah pelaksanaan otonomi daerah
- 5) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat
- 6) Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
- 7) Meningkatkan Sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan, meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah dalam mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatkan kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan PAD dan sumber pendapatan lainnya
- 8) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah
- 9) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

BAB V
RENCANA KERJA DAN TARGET KINERJA

Tabel 5.1.
Rencana Kerja dan Target Kinerja

No	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	JUMLAH
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			16.299.217.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Tengah	Surat terkirim dengan baik dan tepat waktu	45.390.000
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Tengah	Terpenuhinya Jasa peralatan dan perlengkapan	450.000.000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jawa Tengah	Terlaksananya kegiatan jaminan barang milik daerah 1 unit gudang	620.500.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jawa Tengah	Terpenuhinya kebutuhan alat tukls kantor	675.592.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jawa Tengah	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	757.493.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jawa Tengah	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan	127.108.000
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jawa Tengah	Terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor	300.000.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jawa Tengah	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum harian rapat, dan tamu untuk kegiatan kantor	1.648.366.000
9	Penyediaan Sarana Kesehatan	Jawa Tengah	Tersedianya logistik serta sarana pendukung poliklinik	201.342.000
10	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Tengah	Terpenuhinya jaringan komunikasi air dan telepon	2.360.628.000
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas	Jawa Tengah	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih	1.340.571.000
12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jawa Tengah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan informasi	360.690.000
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jawa Tengah	Terwujudnya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi di pusat/ daerah	3.888.589.000
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jawa Tengah	Terselesainya tugas pelayanan perkantoran	3.522.948.000

No	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	JUMLAH
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				23.397.119.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jawa Tengah	Terpeliharanya bangunan Rumah Dinas	2.224.692.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jawa Tengah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang siap dipakai	3.400.000.000
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gd Kantor	Jawa Tengah	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1.200.000.000
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jawa Tengah	Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga	700.000.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	Jawa Tengah	Terpeliharanya data-data kearsipan	150.000.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Jawa Tengah	Terpeliharanya barang-barang bercorak kesenian dan kebudayaan	43.249.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jawa Tengah	Terpeliharanya bangunan gedung tempat perkantoran	800.000.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jawa Tengah	Terpeliharanya Meubelair kantor	38.980.000
9	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jawa Tengah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang memadai	14.840.198.000
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				792.575.000
25	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jawa Tengah	Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai	792.575.000
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				1.600.000.000
26	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jawa Tengah	Peningkatan Kualitas Anggota Dewan dan Peningkatan SDM Pegawai	1.600.000.000

No	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	JUMLAH
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			56.261.089.000
1	Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat	17.300.000.000
2	Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	Ditetapkannya/dibahasnya 19 Raperda/Peraturan DPRD	11.000.000.000
3	Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah	Indonesia	Terwujudnya hubungan yang sinergi antara DPRD dan masyarakat Jawa Tengah	19.601.089.000
4	Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan	Indonesia	Ditetapkannya/dibahasnya 19 Raperda/Peraturan DPRD	3.150.000.000
5	Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi melalui media massa	Jawa Tengah	Tersosialisasikannya kebijakan dan kinerja DPRD melalui media massa	450.000.000
6	Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar	Jawa Tengah	Tersosialisasikannya kebijakan kinerja DPRD dalam 9 edisi majalah	290.000.000
7	Kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	Terselenggaranya 8 seminar untuk penyempurnaan pembuatan Raperda	1.270.000.000
8	Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan	Jawa Tengah	Terinformasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada masyarakat	1.600.000.000
9	Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik	Jawa Tengah	Terselenggaranya pertemuan Dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan pakar LSM, Pers, dan Masyarakat	1.600.000.000

Tabel 5.2.
Berdasarkan Program

No	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.299.217.000
	Terdiri dari 14 Kegiatan	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	23.397.119.000
	Terdiri dari 9 Kegiatan	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	792.575.000
	Terdiri dari 1 Kegiatan	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.600.000.000
	Terdiri dari 1 Kegiatan	
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	56.261.089.000
	Terdiri dari 9 Kegiatan	
	Jumlah	98.350.000.000

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan Tahunan penyelenggaraan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya:

1. Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, maka Renja SKPD ini merupakan acuan dan pedoman bagi segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Rencana Kerja (Renja SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini perlu dijabarkan lagi secara terperinci dari bagaimana operasionalnya oleh semua bagian yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Perlu adanya tim kerja lintas bagian serta koordinasi dan sinkronisasi lintas bagian agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi laporan kinerja tahunan maupun lima tahunan.

4. Hasil-hasil pelayanan terhadap Aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan menciptakan good governance di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah semoga bermanfaat.

Semarang, Januari 2016.

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum

Pembina Utama Madya
NIP.19591006 198503 1 007

Daftar Pustaka

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5).
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Susunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11).